

**CASCADING PERJANJIAN KINERJA ESELON II
BADAN KEUANGAN DAERAH KAB.HSS**

ESELON II										
No.	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Indikator Tujuan (Tahun 2018)	Sasaran Staregis	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Kondisi Awal (2016)	Target Indikator Sasaran (Tahun 2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	126,449,049,300 (120.427.666.000 x 5%) + 120.427.666.000	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Untuk mengukur keberhasilan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah PAD Yang Di tetapkan Pemerintah Daerah	114,693,015,251	126,449,049,300 (114.693.015.251 x 5%) + 114.693.015.251
			Persentasi SKPD Pengelola PAD yang mencapai target penerimaan	83 $\frac{20}{24} \times 100$		Persentasi SKPD Pengelola PAD yang mencapai target penerimaan	Untuk mengukur keberhasilan penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh SKPD Pengelola PAD	Jumlah SKPD Pengelola PAD dibagi SKPD Pengelola PAD yang mencapai target penerimaan PAD di Kali 100 PAD	75	83 $\frac{20}{24} \times 100$
2.	Blm optimalnya Penerapan anggaran berbasis kinerja	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	2. Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD	<09 Oktober	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	2. Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD	Sesuai Permendagri No. 13 Thn 2006 beserta perubahannya bahwa RAPB disampaikan paling lambat 9 bulan 7 hari			<09 Oktober 2018
3.	Blm optimalnya Penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah		3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	< 31 Maret		3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sesuai Permendagri No. 13 Thn 2006 beserta perubahannya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran	28 Maret 2016	≤ 31 Maret 2018	--
4.	Belum optimalnya pelaksanaan penata-usahaan perbendaharaan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	4. Persentasi Realisasi belanja langsung OPD	94	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	4. Persentasi Realisasi belanja langsung OPD	Untuk mengukur efektifitas perencanaan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan	Jumlah realisasi belanja Langsung APBD di bagi Jumlah Target Belanja Langsung APBD di kali 100 %	50.86	94
			5. Persentasi SP2D Dengan Sumber Dana dan Kode Rekening Yang Tepat	100		5. Persentasi SP2D Dengan Sumber Dana dan Kode Rekening Yang Tepat	Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah SP2D Dengan Sumber Dana dan Kode Rekening Yang Tepat di bagi Jumlah Seluruh SP2D di Kali 100%		100
5.	Belum optimalnya penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase Tanah Milik Pemerintah Yang Bersertifikat	52	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat	Salah satu Tolak Ukur Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Kelengkapan Dokumen dan Pengamanan Aset, dan Validasi Data BMD	Jumlah Tanah Pemkab yang bersertifikat di bagi Jumlah keseluruhan tanah pemkab dikali 100%	50.86	52
			2. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100		2. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan		Jumlah Data Aset SIMDA BMD di Bagi Jumlah Data Aset di Neraca di Kali 100%		100
6.	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	1. Survey Kepuasan Masyarakat	85	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	1. Survey Kepuasan Masyarakat	Untuk mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Yg diberikan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Yang Dilaksanakan	85	85
			2. Persentasi Keluhan Masyarakat yang ditindak lanjuti	100		2. Persentasi Keluhan Masyarakat yang ditindak lanjuti	Tindak Lanjut OPD dalam menghadapi keluhan masyarakat	Jumlah Pengaduan Masy. Yang Tindak Lanjuti dibagi Jumlah Seluruh Pengaduan Masyarakat di Kali 100%		100
			3. Persentase Temuan BPK/masyarakat yang ditindak lanjuti	100		3. Persentase Temuan BPK/masyarakat yang ditindak lanjuti	Tindak Lanjut OPD dalam menanggapi Temuan BPK	Jumlah Temuan BPK Yang Selesai ditindak Lanjuti dibagi Jumlah Temuan BPK di Kali 100%		100
			4. Predikat Penilaian AKIP	BB		4. Predikat Penilaian AKIP	Nilai Hasil Penilaian AKIP	Predikat AKIP		B



Kandangan, 17 Maret 2017
Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. HSS,

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 004

**CASCADING PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BADAN KEUANGAN DAERAH KAB.HSS**

ESELON III					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi / Penjelasan	Target Tahun 2018		Program
1	2	2	3		4
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB	Target Penerimaan Pendapatan dari PBB-P2 dan BPHTB	1,628,963,700	--	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	1. Jumlah Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB	Target Penerimaan Pendapatan dari Sektor Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB	124,820,085,600	--	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	2. Cakupan SKPD Pengelola PAD yang mencapai target penerimaan	SKPD yang memiliki penerimaan/pendapatan sebagai PAD	91	$\frac{21}{23} \times 100$	
	3. Cakupan Pelaporan Dana Perimbangan	Laporan Berkala Dana Perimbangan	4 Dokumen		
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Cakupan RKA dan RKAP SKPD sesuai dgn ketentuan	Tersusunnya RKA dan RKAP SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	146 Dokumen	--	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	2. Cakupan DPA dan DPPA SKPD sesuai dgn ketentuan	Tersusunnya DPA dan DPPA SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	146 Dokumen	--	
	3. Cakupan Pedoman Penyusunan RKA SKPD	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA bagi SKPD	1 Dokumen	--	
	4. Cakupan Rancangan APBD Tepat Waktu	Tersusunnya APBD Tepat waktu sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006	>09 Oktober 2017	--	
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Cakupan SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan	SP2D yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	--	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	2. Cakupan Bendahara SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi	Merekonsiliasi Pengeluaran kas Bendahara Pengeluaran SKPD	100	--	
	3. Cakupan Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Sesuai Ketentuan	100	--	
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Cakupan SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan	Disampaikannya Laporan Keuangan secara SAP berbasis Akrual secara tepat waktu oleh SKPD	100	--	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	2. Cakupan Rancangan Lap. Keuangan Tepat Waktu	Disampaikannya Lap. Keu Tepat Waktu Sesuai Permendagri No. 13 Thn 2006	≤ 31 Maret		
	3. Cakupan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai ketentuan	Dibuatnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	--	
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Cakupan Tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Perbandingan Tanah Milik Pemkab yang bersertifikat dan Tidak	52	--	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	2. Cakupan Penghapusan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan Pindahtanganan BMD	Data Penghapusan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan Pindahtanganan BMD yang dilaksanakan	100	--	
	3. Cakupan SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	100	--	
Peningkatan Pelayanan Publik Yang Prima	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai (Indeks) Hasil survey yang dilakukan kepada masyarakat	85	--	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	2. Persentasi Keluhan Masyarakat yang ditindak lanjuti	Tindak Lanjut SKPD dalam menghadapi keluhan masyarakat	100	--	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	3. Persentase Temuan BPK/masyarakat yang ditindak lanjuti	Tindak Lanjut SKPD dalam menanggapi Temuan BPK	100	--	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	4. Nilai AKIP	Nilai Hasil Penilaian AKIP	BB	--	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Kandangan, 17 Maret 2017
Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. HSS

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1004

**CASCADING PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
BADAN KEUANGAN DAERAH KAB.HSS TAHUN 2018**

ESELON IV				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi / Penjelasan	Target Tahun 2018			
1	2	3	4	5	6	7
Terlaksananya Penerimaan PAD dari Sektor PBB-P2 dan BPHTB	1. Jumlah Penilaian objek-objek PBB-P2 dan BPHTB	Melakukan Pendataan dan Penilaian terhadap Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	1,628,963,700	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyediaan dokumen PBB-P2 dan BPHTB	Rp 95,321,000
	1. Jumlah Nilai SPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan	Menerbitkan SPPT PBB-P2 dan BPHTB yang sudah dilakukan penilaian	1,628,963,700		2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 591,785,000
	1. Jumlah Penerimaan PBB - P2 dan BPHTB	Melakukan penerimaan PAD dari PBB-P2 dan BPHTB	1,628,963,700			
Terlaksananya Penerimaan PAD dari Sektor Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain lain PAD Yang Sah	1. Jumlah Proyeksi PAD : Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB Pendapatan Retribusi Daerah Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain lain PAD Yang Sah	Proyeksi Pendapatan yang diperhitungkan berdasarkan kemampuan daerah dalam melakukan Penerimaan PAD	10,282,665,695	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyediaan cetak, cetak SPTPD dan Karcis	Rp 113,604,800
			9,096,037,495			
			5,302,198,020			
	100,139,184,390					
	2. Jumlah SKPD Pengelola Penerimaan PAD	Jumlah SKPD yang melakukan penerimaan PAD	24			
	1. Jumlah Penerimaan PAD : Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB Pendapatan Retribusi Daerah Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain lain PAD Yang Sah	Melaksanakan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan berdasarkan proyeksi pendapatan	10,282,665,695		2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rp 370,715,000
			9,096,037,495			
			5,302,198,020			
100,139,184,390						
2. Jumlah SKPD Pengelola PAD Yang Mencapai Target	Jumlah SKPD yang melakukan penerimaan PAD sesuai target	22				
Terlaksananya pembuatan Laporan Penerimaan dan Realisasi dana Transfer	1. Jumlah Laporan Penerimaan Dana Perimbangan	Pembuatan Rekapitulasi terhadap Penerimaan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil	4			
	2. Jumlah Laporan Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi		4			
	3. Jumlah Laporan Realisasi Penyerapan DAK	Pembuatan Rekapitulasi terhadap Realisasi Penyerapan DAK dan Dana Desa	4			
	4. Jumlah Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa		3			
Terlaksananya penyusunan RKA SKPD Wilayah I	1. Jumlah RKA dan RKAP SKPD yang sesuai satuan harga	Kesesuaian Harga/Nilai pada Rekening Belanja dengan Satuan Harga	74	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan APBD	Rp 346,700,000
	2. Jumlah DPA dan DPPA SKPD yang sesuai dengan kode rekening belanja yang seharusnya	Kesesuaian Kode Rekening Belanja dengan Rekening SIMDA Keuangan	74		2. Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD	Rp 34,400,000
	3. Melaksanakan Pendampingan Penyusunan RKA SKPD	Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam menyusun RKA SKPD	74			
Terlaksananya penyusunan RKA SKPD Wilayah II	1. Jumlah RKA dan RKAP SKPD yang sesuai satuan harga	Kesesuaian Harga/Nilai pada Rekening Belanja dengan Satuan Harga	72		3. Penyusunan pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Rp 46,050,000
	2. Jumlah DPA dan DPPA SKPD yang sesuai dengan kode rekening belanja yang seharusnya	Kesesuaian Kode Rekening Belanja dengan Rekening SIMDA Keuangan	72			
	3. Cakupan Pendampingan Penyusunan RKA SKPD	Melakukan pendampingan kepada SKPD dalam menyusun RKA SKPD	72		4. Penyusunan Perubahan APBD	Rp 608,275,000


ESELON IV						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi / Penjelasan	Target Tahun 2018	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Terlaksananya Pembuatan Raperda APBD yang tepat waktu	1. Jumlah Buku standar satuan harga tepat waktu	Membuat Dokumen Indeks Harga Satuan Kabupaten	73		5. Penyusunan standar satuan harga	Rp 78,950,000
	2. Cakupan Draf Raperda APBD dan PABD	Membuat Draf Raperda APBD dan PABD	2		6. Pendampingan Penyusunan RKA	Rp 111,250,000
	3. Cakupan Draf Raperbub tentang Penjabaran APBD dan PABD	Membuat Draf Raperda APBD dan PABD	2			
	4. Cakupan dokumen SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD tepat waktu	Membuat SE Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	1			
	5. Cakupan Penyiapan dan pemeliharaan SIMDA Keuangan	Memelihara SIMDA Keuangan	1			
Terlaksananya pelayanan penerbitan SP2D	1. Cakupan SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan	Pelayanan dalam Menerbitkan SP2D bagi SKPD maupun mitra pemerintah	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pengelolaan Sistem Informasi dan Verifikasi data keuangan daerah	Rp 453,100,000
Terlaksananya Pengelolaan Kasda dan Gaji Pegawai	1. Jumlah Daftar Gaji Pegawai yang dicetak	Mencetak Daftar Gaji se Kabupaten Hulu Sungai Selatan	12		2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	Rp 55,800,000
	2. Jumlah Rekonsiliasi Pengeluaran Kas yang dilaksanakan	Melakukan Rekonsiliasi Terhadap Pengeluaran Kas yang telah dilaksanakan oleh SKPD	4			
Terlaksananya pengeluaran PPKD	1. Cakupan Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah kepada Yang Berhak sesuai ketentuan	Menyalurkan Bantuan Sosial dan Hibah kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100			
Terlaksananya penyusunan Laporan yang sesuai standar dan tepat waktu	1. Jumlah Bahan Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja SKPD wil I	Menyiapkan Bahan Laporan, Penelitian dan Penelaahan atas Realisasi Penerimaan dan Belanj, laporan Semesteran/Prognosis dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wil I	12		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan Laporan Triwulanan Keuangan Daerah
	2. Cakupan Penelitian dan Penelaahan Input Transaksi Penerimaan dan Belanja SKPD Wil I		12	2. Penyusunan Laporan realisasi semester 1 dan Prognosis		Rp 47,325,250
	3. Jumlah Laporan Semesteran Wil. I		36			
	4. Jumlah Laporan Keuangan Wil. I		26			
Terlaksananya penyusunan Laporan yang sesuai standar dan tepat waktu	1. Jumlah Bahan Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja SKPD wil II	Menyiapkan Bahan Laporan, Penelitian dan Penelaahan atas Realisasi Penerimaan dan Belanj, laporan Semesteran/Prognosis dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wil II	12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3. Peny. Ranc. Peraturan KDH Ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 51,079,000
	2. Cakupan Penelitian dan Penelaahan Input Transaksi Penerimaan dan Belanja SKPD Wil II		12		4. Peny. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 84,655,000
	3. Jumlah Laporan Semesteran Wil. II		37			
	4. Jumlah Laporan Keuangan Wil. II		26			
Terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1. Cakupan Draf Laporan Keuangan Pemda	Menghimpun laporan Keuangan SKPD	1		5. Peny. Laporan Keuangan Pemda	Rp 506,615,000
	2. Cakupan Draf Rancangan Rerda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Membuat Draf Rancangan Rerda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1		6. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 88,490,780
	3. Cakupan Draf Raperbub Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Membuat Draf RaPerda Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1			
Terlaksananya Pengamanan BMD	1. Cakupan Tanah Pemda Yang bersertifikat	Melaksanakan penyertifikatan tanah Pemkab dengan pihak terkait	52	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Inventarisasi Barang/Aset Daerah	Rp 266,546,000
	2. Jumlah Simda yang terpelihara	Memelihara SIMDA BMD yang ada agar tetap terawat dan siap digunakan	2		2. Pengamanan Barang/Aset Daerah	Rp 826,525,000
	3. Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara	Memelihara Rumah Dinas yang ada agar tetap terawat dan siap digunakan	4		3. Peningkatan dan Pemeliharaan SIMDA BMD	Rp 43,900,000
Terlaksananya Pemanfaatan dan Pindah tangan BMD	1. Cakupan BMD yang dihapuskan, dimusnahkan oleh SKPD	Jumlah BMD yang dihapus dan dimusnahkan sesuai usulan SKPD	100	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4. Pengelolaan Aset Rumah Dinas	Rp 480,400,000
	2. Cakupan BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtanggankan oleh SKPD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtanggankan sesuai usulan SKPD	100		1. Peningkatan Manajemen Aset /BMD	Rp 254,500,000
					2. Fasilitasi Majelis TP-TGR	Rp 107,950,000

ESELON IV				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi / Penjelasan	Target Tahun 2018			
1	2	3	4	5	6	7
Terlaksananya Perencanaan dan Pengadaan BMD	1. Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD dan RKPBMMD	Setiap SKPD menyampaikan Data RKBMD dan RKPBMMD	45	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	Rp 55,425,000
	2. Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Hasil Pengadaan	6		2. Pengadaan Aset Kendaraan	Rp 1,829,970,000
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Hasil Pengadaan	6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3. Pengelolaan Aset Kendaraan	Rp 16,800,000
	1. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Melakukan survey kepada masyarakat serta	85		1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 37,000,000
	2. Cakupan Keluhan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti	menindaklanjuti keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan	100		2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 12,750,000
	3. Cakupan Temuan BPK Yang Ditindak Lanjuti	Tindak lanjut yang dilakukan atas Temuan/	100		3. Penyediaan alat tulis kantor	Rp 169,965,500
	4. Jumlah Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara oleh Badan Keuangan Daerah	2		4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 9,566,000
	5. Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik	Persentasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bakeuda yang dipergunakan dalam kondisi baik	100		5. Penyediaan makanan dan minuman	Rp 26,200,000
	6. Jumlah Mobil Operasional Layak Pakai	Jumlah Mobil Operasional yang masuk aset Bakeuda dalam keadaan layak pakai	2		6. Rapat rapat koord. dan konsult. ke luar daerah	Rp 495,000,000
					7. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran	Rp 160,425,000
					8. Rapat rapat koord. dan konsult. ke dalam daerah	Rp 52,000,000
					9. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 110,400,000
					10. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 62,000,000
			11. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Rp 13,600,000		
			12. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 62,400,000		
			13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 99,712,250		
			14. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 191,919,000		
			15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Rp 7,200,000		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16. Pembangunan gedung kantor	4,065,900,000	
				17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 103,600,000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Rp 30,275,000	
Membuat Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Cakupan Laporan LKJ/SAKIP tepat waktu	Mengolah data capaian kinerja bidang untuk disusun jadi Laporan Kinerja atau SAKIP SKPD	1	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 26,455,000
	2. Cakupan Rencana Kerja SKPD	Menghimpun Data Rencana Kerja dari Bidang untuk dijadikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah	1			

ESELON IV				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi / Penjelasan	Target Tahun 2018			
1	2	3	4	5	6	7
	3. Cakupan LPPD SKPD	Informasi Mengenai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	1			
	4. Cakupan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	Menghimpun data dari PPTK mengenai pelaksanaan kegiatan untuk dibuat laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	12			
Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	1. Cakupan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Melaksanakan pembuatan laporan Semesteran / Prognosis SKPD	1			
	2. Cakupan Laporan Keuangan SKPD	Menghimpun data Keuangan kemudian dibuat Laporan Keuangan SKPD	1			

Kandangan, 17 Maret 2017
Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. HSS




Dr. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1004